

## BAB DUA

# TINJAUAN TEORITIS

### 2.1 TEORI BASIS EKONOMI

Teori basis ini didasari oleh pemikiran **J.S.Mill (1948)** yaitu bahwa dalam memecahkan masalah pertumbuhan dan pemerataan regional diisyaratkan adanya perdagangan antar-daerah, dengan mewujudkan spesialisasi daerah. Dasar pemikiran teori basis ekonomi menurut **Kadariah (1985)** adalah karena industri basis menghasilkan barang dan jasa baik untuk pasar di dalam maupun di luar daerah, maka penjualan hasil keluar daerah itu akan mendatangkan arus pendapatan ke dalam daerah tersebut. Arus pendapatan ini menyebabkan baik kenaikan konsumsi maupun kenaikan investasi di daerah itu, yang pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan kesempatan kerja. Jika di daerah tersebut ada pengangguran, maka kesempatan kerja yang baru itu dapat menampungnya, atau jika di daerah itu tidak terdapat pengangguran maka daerah itu mempunyai daya tarik bagi orang-orang dari luar daerah yang mencari pekerjaan. Kenaikan pendapatan ini tidak hanya menaikkan permintaan terhadap hasil industri basis melainkan juga akan menaikkan permintaan hasil industri lokal non basis dan permintaan ini selanjutnya akan menaikkan investasi di industri-industri non basis. Dengan kata lain penanaman modal di sektor-sektor lokal merupakan investasi sebagai akibat kenaikan pendapatan dari industri-industri basis.

Bertambah banyaknya sektor basis di suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan terhadap barang dan jasa di dalamnya, meningkatkan nilai investasi dan menimbulkan kenaikan volume kegiatan bukan basis. Dengan demikian, sesuai dengan namanya kegiatan basis mempunyai peran sebagai penggerak pertama dimana setiap perubahan mempunyai efek *multiplier* terhadap perekonomian agregat. Berdasarkan gagasan inilah, maka para ahli berpendapat bahwa sektor-sektor basis inilah yang seharusnya dikembangkan di suatu daerah.

### POTENSI EKONOMI DAERAH

Setiap daerah memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan dalam upaya memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan potensi ekonomi daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (Suparmoko, 2002).

Tujuan dari pengembangan ekonomi di daerah pada umumnya adalah peningkatan pendapatan riil per kapita serta adanya unsur keadilan atau pemerataan dalam penghasilan dan kesempatan berusaha. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan strategi yang menyeluruh dalam proses pengembangan potensi ekonomi di daerah, sebagai pedoman dan pegangan dalam setiap pengambilan kebijakan.

Dalam mempersiapkan strategi pengembangan potensi ekonomi di daerah, setidaknya terdapat lima langkah yang harus ditempuh, yaitu:

1. Mengidentifikasi sektor-sektor kegiatan mana yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing sektor.

2. Mengidentifikasi sektor-sektor yang potensinya rendah untuk dikembangkan dan mencari faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya potensi sektor tersebut untuk dikembangkan.
3. Mengidentifikasi sumber daya (faktor-faktor produksi) yang ada termasuk sumber daya manusianya dan yang siap digunakan untuk mendukung perkembangan setiap setor yang bersangkutan.
4. Dengan model pembobotan terhadap variabel-variabel kekuatan dan kelemahan untuk setiap sektor dan sub-sektor, maka akan ditemukan sektor-sektor andalan yang selanjutnya dianggap sebagai potensi ekonomi yang patut dikembangkan di daerah yang bersangkutan.
5. Menentukan strategi yang akan ditempuh untuk pengembangan sektor-sektor andalan yang diharapkan dapat menarik sektor-sektor lain untuk tumbuh sehingga perekonomian akan dapat berkembang dengan sendirinya (*self propelling*) secara berkelanjutan (*sustainable development*).

Persoalan pokok dalam pembangunan daerah sering terletak pada sumber daya dan potensi yang dimiliki guna menciptakan peningkatan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut ada kerja sama pemerintah dan masyarakat untuk dapat mengidentifikasi potensi-potensi yang tersedia dalam daerah dan diperlukan sebagai kekuatan untuk pembangunan perekonomian wilayah (Sjafrizal, 2008).

Pengembangan wilayah diartikan sebagai semua upaya yang dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan wilayah yang ditandai dengan pemerataan pembangunan dalam semua sektor dan pada seluruh bagian wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi secara serentak pada semua tempat dan semua sektor perekonomian, tetapi hanya pada titik-titik tertentu dan pada sektor-sektor tertentu pula. Disebutkan juga bahwa investasi diprioritaskan pada sektor-sektor utama yang berpotensi dan

dapat meningkatkan pendapatan wilayah dalam jangka waktu relatif singkat (Glasson, 1990).

Dari definisi tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa wilayah yang memiliki potensi berkembang lebih besar akan berkembang lebih pesat, kemudian pengembangan wilayah tersebut akan merangsang wilayah sekitarnya. Bagi sektor yang memiliki potensi berkembang lebih besar cenderung dikembangkan lebih awal yang kemudian diikuti oleh perkembangan sektor lain yang kurang potensial.

Dalam pengembangan wilayah, pengembangan tidak dapat dilakukan serentak pada semua sektor perekonomian akan tetapi diprioritaskan pada pengembangan sektor-sektor perekonomian yang potensi berkembangnya cukup besar. Karena sektor ini diharapkan dapat tumbuh dan berkembang pesat yang akan merangsang sektor-sektor lain yang terkait untuk berkembang mengimbangi perkembangan sektor potensial tersebut.

Perkembangan ekonomi suatu wilayah membangun suatu aktivitas perekonomian yang mampu tumbuh dengan pesat dan memiliki keterkaitan yang tinggi dengan sektor lain sehingga membentuk *forward linkage* dan *backward linkage*. Pertumbuhan yang cepat dari sektor potensial tersebut akan mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya yang pada akhirnya secara tidak langsung sektor perekonomian lainnya akan mengalami perkembangan.

Jadi disimpulkan bahwa pengembangan suatu sektor ekonomi potensial dapat menciptakan peluang bagi berkembangnya sektor lain yang terkait, baik sebagai input bagi sektor potensial maupun sebagai imbas dari meningkatnya kebutuhan tenaga kerja sektor potensial yang mengalami peningkatan pendapatan. Hal inilah yang memungkinkan pengembangan sektor potensial dilakukan sebagai langkah awal dalam pengembangan perekonomian wilayah dan pengembangan wilayah secara keseluruhan.

## STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI BASIS

Potensi ekonomi di daerah pada dasarnya dapat dibagi kedalam dua sektor: yaitu sektor ekonomi yang menjadi kegiatan basis dan sektor ekonomi yang bukan kegiatan basis.

1. Kegiatan-kegiatan basis (*basic activities*) adalah kegiatan-kegiatan yang mengekspor barang dan jasa ke tempat-tempat di luar batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atau kepada orang-orang yang datang dari luar wilayah perekonomian bersangkutan;
2. Kegiatan-kegiatan yang bukan basis (*non basic activities*) adalah kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian masyarakat daerah yang bersangkutan, kegiatan ini tidak mengekspor barang dan jasa, produksi dan pemasaran terbatas pada wilayah daerah yang bersangkutan.

Pada dasarnya teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan investasi industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, dan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja (*job creation*).

Inti dari teori ini adalah sektor unggulan menghasilkan barang-barang dan jasa untuk dipasarkan di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan terhadap sektor unggulan tetapi juga menaikkan permintaan akan sektor non unggulan. Berdasarkan teori ini sektor unggulan yang

harus dikembangkan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Arsyad, 1999).

Strategi pembangunan daerah yang muncul didasarkan pada teori ini adalah di mana arah penekanannya terhadap arti pentingnya bantuan (*aid*) kepada dunia usaha yang mempunyai pasar baik secara nasional maupun internasional. Implementasi kebijakannya mencakup pengurangan hambatan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada akan didirikan di daerah tersebut (Arsyad, 1999).

Menurut Glasson (1990) kegiatan-kegiatan Basis (*Basic activities*) adalah kegiatan mengekspor barang-barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau memasarkan barang dan jasa mereka kepada orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan bukan basis (*Non basic activities*) adalah kegiatan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan ini tidak mengekspor barang jadi; luas lingkup produksi dan daerah pasar yang terutama bersifat lokal. Implisit di dalam pembagian kegiatan-kegiatan ini terdapat hubungan sebab akibat yang membentuk teori basis ekonomi. Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan barang dan jasa sehingga akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan. Sebaliknya berkurangnya kegiatan basis akan mengurangi pendapatan suatu daerah dan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa dan akan menurunkan volume kegiatan (Richardson, 1977). Kegiatan basis mempunyai peranan penggerak pertama (*Prime mover role*) dimana setiap perubahan mempunyai efek *multiplier* terhadap perekonomian regional.

## 2.2 KONSEP DAYA SAING

Konsep daya saing daerah berkembang dari konsep daya saing yang digunakan untuk perusahaan dan negara. Selanjutnya konsep tersebut dikembangkan untuk tingkat negara sebagai daya saing global, khususnya melalui lembaga *World Economic Forum (Global Competitiveness Report)* dan *International Institute for Management Development (World Competitiveness Yearbook)*. Daya saing ekonomi suatu negara seringkali merupakan cerminan dari daya saing ekonomi daerah secara keseluruhan. Disamping itu, dengan adanya tren desentralisasi, maka makin kuat kebutuhan untuk mengetahui daya saing pada tingkat daerah (PPSK BI, 2008).

### DAYA SAING GLOBAL

Terdapat berbagai konsep dan pengertian mengenai daya saing. Pengertian daya saing mulai berkembang setelah Porter (1990) mendefinisikan daya saing nasional. Porter (1990) mendefinisikan daya saing nasional sebagai: *“luaran dari kemampuan suatu negara untuk berinovasi dalam rangka mencapai, atau mempertahankan posisi yang menguntungkan dibandingkan dengan negara lain dalam sejumlah sektor-sektor kuncinya.”* Secara eksplisit, Porter (1990) menyatakan bahwa konsep daya saing yang diterapkan pada level nasional nasional tak lain adalah “produktivitas” yang didefinisikannya sebagai nilai output yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Bank Dunia menyatakan hal yang relatif sama dimana “daya saing mengacu kepada besaran serta laju perubahan nilai tambah per unit input yang dicapai oleh perusahaan”.

Menurut Cho (2003), definisi daya saing yang paling populer pada tingkat nasional juga dapat ditemukan dalam Laporan Komisi Kemampuan Bersaing Presiden yang ditulis untuk pemerintahan Reagan pada tahun 1984 yaitu sebagai berikut: *“Kemampuan bersaing sebuah negara adalah derajat di mana negara itu dapat, di bawah keadaan pasar yang bebas dan*

*adil, menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi uji pasar internasional sementara secara simultan melakukan perluasan pendapatan riil dari para warga negaranya. Kemampuan bersaing pada tingkat nasional didasarkan pada kinerja produktivitas superior” ( Cho, 2003).*

*World Economic Forum (WEF), suatu lembaga internasional yang secara rutin menerbitkan “Global Competitiveness Report”, mendefinisikan daya saing nasional sebagai “kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.” Kunci utama sebagai faktor penentu daya saing nasional adalah kebijakan-kebijakan yang tepat, institusi- institusi yang sesuai, serta karakteristik-karakteristik ekonomi lain yang mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.*

*Internasional Institute for Management Development (IMD) dengan publikasinya “World Competitiveness Yearbook” mendefinisikan daya saing nasional sebagai “kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan nasional dengan cara mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas, globality dan proximity, serta dengan mengintegrasikan hubungan-hubungan tersebut ke dalam suatu model ekonomi dan sosial.” Akan tetapi, baik Bank Dunia, Porter serta literatur-literatur mengenai daya saing memandang bahwa daya saing tidak secara sempit mencakup hanya sebatas tingkat efisiensi suatu perusahaan. Daya saing mencakup aspek yang lebih luas, tidak berfokus hanya pada level mikro perusahaan, tetapi juga mencakup aspek diluar perusahaan seperti iklim berusaha (*business environment*) yang jelas-jelas diluar kendali perusahaan. Aspek-aspek tersebut dapat bersifat *firm-specific, region-specific*, dan bahkan *country-specific* (BI-PPSK-FE UNPAD, 2002) .*

Martin (2003) menyatakan konsep dan definisi daya saing suatu negara atau suatu daerah mencakup beberapa elemen utama sebagai berikut.

1. Meningkatnya taraf hidup masyarakat;
2. Mampu berkompetisi dengan daerah maupun daerah lain;
3. Mampu memenuhi kewajibannya baik domestik maupun internasional;
4. Dapat menyediakan lapangan kerja; dan
5. Pembangunan yang berkesinambungan dan tidak membebani generasi yang akan datang (Martin, 2003, dalam PPSK-BI, 2008)

Dari berbagai pengertian daya saing di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat konsensus yang secara tegas mendefinisikan daya saing. Walaupun demikian, hampir semua ahli memiliki kesamaan pandangan mengenai apa saja yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing (Sachs *et al.*, 2000 dalam Abdullah *et al.*, 2002). Oleh karena itu, masih terdapat banyak kemungkinan para ahli dan peneliti untuk mengeksplorasi hal-hal apa saja yang menjadi faktor-faktor penentu daya saing suatu negara.

#### DAYA SAING DAERAH

Berbagai literatur yang membahas tentang konsep dan definisi daya saing daerah. Pembahasan mengenai daya saing daerah lebih banyak didominasi oleh laporan atau publikasi terbitan dari kawasan Eropa. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya keinginan dari negara-negara kawasan Eropa untuk mempersempit jarak peringkat daya saing mereka dengan Amerika Serikat, dan semakin meningkatnya konsensus yang menyatakan bahwa daerah merupakan unit spasial utama yang paling penting untuk meningkatkan kesejahteraan suatu negara.

Daya saing daerah menurut definisi yang dibuat Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UK-DTI) adalah *"kemampuan suatu daerah dalam*

*menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional.”* Sementara itu Centre for Urban and Regional Studies (CURDS), Inggris men definisikan daya saing daerah sebagai *“kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya.”*

The European Commision mendefinisikan daya saing sebagai *“kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar internasional, diiringi dengan kemampuan mempertahankan pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, lebih umumnya adalah kemampuan (regions) untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi sementara terekspos pada daya saing eksternal”* (European Commision, 1999 p.4. dalam Garnier, Martin dan Tyler, 2004). Sementara Huggins (2007) dalam publikasi *“UK Competitiveness Index”* mendefenisikan daya saing daerah sebagai *“kemampuan dari perekonomian untuk menarik dan mempertahankan perusahaan-perusahaan dengan kondisi yang stabil atau dengan pangsa pasar yang meningkat dalam aktivitasnya, dengan tetap mempertahankan atau meningkatkan standar kehidupan bagi semua yang terlibat didalamnya.”* Dalam pengertian daya saing ini, secara tersirat dinyatakan pula bahwa kondisi perekonomian yang kondusif merupakan suatu syarat mutlak untuk meningkatkan daya saing daerah.

Studi mengenai daya saing daerah juga dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi daerah. Studi KPPOD (2005) ini difokuskan pada daya saing investasi untuk tingkat kabupaten/kota. Pada tahun 2005, studi yang dilakukan oleh KPPOD ini melibatkan 228 kabupaten di Indonesia. KPPOD (2005) ini menyatakan bahwa investasi yang akan masuk ke suatu daerah akan bergantung pada daya saing investasi yang di miliki oleh daerah yang bersangkutan.

Hasil temuan KPPOD menyebutkan bahwa ada dua karakteristik yang umumnya dimiliki oleh daerah-daerah yang mempunyai daya saing tinggi. *Pertama*, daerah-daerah tersebut memiliki kondisi perekonomian yang baik. *Kedua*, adalah daerah-daerah dengan kondisi keamanan, politik, sosial dan budaya yang kondusif. Kondisi perekonomian daerah yang baik dan ditunjang oleh kondisi keamanan, politik, sosial budaya dan birokrasi yang ramah terhadap kegiatan usaha, akan menciptakan daya saing investasi daerah. Kondisi yang baik pada faktor-faktor tersebut akan semakin mempengaruhi daya saing investasi daerah jika didukung oleh ketersediaan tenaga kerja yang cukup dengan kualitas yang baik dan infrastruktur fisik pendukung kegiatan usaha yang memadai (KKPOD, 2005).

Martin dan Tyler (2003) menyebutkan argumen mengapa daerah maupun negara saling berkompetisi:

- Untuk investasi, melalui kemampuan daerah untuk menarik masuknya modal asing, swasta, dan modal publik;
- Untuk tenaga kerja, dengan kemampuan untuk menarik masuknya tenaga kerja yang terampil, *entrepreneur-entrepreneur* dan tenaga kerja yang kreatif, dengan cara menyediakan lingkungan yang kondusif dan pasar tenaga kerja domestik.
- Untuk teknologi, melalui kemampuan daerah untuk menarik aktivitas inovasi dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari konsep dan definisi mengenai daya saing di atas, terdapat kesamaan esensi yang cukup jelas antara daya saing daerah dan daya saing nasional. Dapat diambil satu kesimpulan bahwa dalam mendefinisikan daya saing perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Hal ini memungkinkan kita lebih memilih mendefinisikan daya saing sebagai “kemampuan suatu

perekonomian” daripada “kemampuan sektor swasta atau perusahaan.”

- Pelaku ekonomi (*economic agent*) bukan hanya perusahaan, akan tetapi juga rumah tangga, pemerintah, dan lain-lain. Semuanya berpadu dalam suatu sistem ekonomi yang sinergis. Tanpa memungkirkan peran besar sektor swasta perusahaan dalam perekonomian, fokus perhatian tidak hanya pada itu saja. Hal ini diupayakan dalam rangka menjaga luasnya cakupan konsep daya saing.
- Tujuan dan hasil akhir meningkatnya daya saing suatu perekonomian tak lain adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk di dalam perekonomian tersebut. Kesejahteraan (*level of living*) adalah konsep yang maha luas yang pasti tidak hanya tergambarkan dalam sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya satu aspek dari pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat.
- Kata kunci dari konsep daya saing adalah “kompetisi.” Disinilah peran keterbukaan terhadap kompetisi dengan para kompetitor menjadi relevan. Kata “daya saing” menjadi kehilangan maknanya pada perekonomian yang tertutup

Mempertimbangkan hal-hal diatas, akhirnya PPSK-BI mendefinisikan daya saing daerah sebagai: “kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.” (Abdullah *et al.*, 2002).

### INDIKATOR UTAMA DAN PRINSIP DAYA SAING DAERAH

Penentuan indikator utama daya saing daerah merupakan bagian yang penting dalam analisis daya saing ekonomi daerah. Pemahaman indikator utama daya saing ekonomi daerah yang terbatas dan tidak secara komprehensif menjadikan tidak adanya keseragaman pemahaman yang

benar oleh *Stakeholders* di tingkat pemerintah daerah dan pada gilirannya akan dapat menyebabkan adanya perbedaan analisis dan kesimpulan terhadap tingkat daya saing yang dimiliki oleh suatu daerah (Hidayat, 2012).

Irawati *et al.*, (2012) dalam penelitiannya yang mengukur tingkat daya saing daerah menggunakan variabel perekonomian daerah, variabel infrastruktur, sumber daya alam, dan variabel sumber daya manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara Santoso (2009) dalam penelitiannya yang mengukur daya saing kota-kota besar di Indonesia menyebutkan faktor utama pembentuk daya saing terdiri dari 5 indikator utama, yaitu: (1) lingkungan usaha produktif, (2) perekonomian daerah, (3) ketenagakerjaan dan sumber daya manusia, (4) infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan, (5) perbankan dan lembaga keuangan. Hidayat (2012) dalam penelitiannya yang mengukur daya saing ekonomi Kota Medan, menyebutkan beberapa indikator utama penentu daya saing ekonomi Kota Medan yaitu: ekonomi daerah, infrastruktur, sistem keuangan, kelembagaan, dan sosial politik.

Potret daya saing daerah kabupaten/kota di Indonesia secara keseluruhan merupakan representasi dari kinerja-kinerja indikator-indikator pembentuknya, semakin baik kinerja indikator-indikator tersebut, maka semakin tinggi pula daya saing daerah suatu kabupaten/kota, sebaliknya apabila kinerja indikator-indikator tersebut rendah, maka semakin rendah pula daya saing kabupaten/kota tersebut (PPSK BI, 2008).

Penelitian yang dilakukan Abdullah *et al.*, (2002) menyebutkan indikator-indikator utama yang dianggap menentukan daya saing daerah adalah (1) Perekonomian daerah, (2) Keterbukaan, (3) Sistem Keuangan, (4) Infrastruktur dan sumber daya alam, (5) Ilmu pengetahuan dan teknologi, (6) Sumber daya manusia, (7) Kelembagaan, (8) *Governance* dan Kebijakan pemerintah, dan (9) Manajemen dan ekonomi mikro. Masing-masing indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Perekonomian Daerah

Perekonomian daerah merupakan ukuran kinerja secara umum dari perekonomian makro (daerah) yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi capital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral perekonomian, serta tingkat biaya hidup, indicator kinerja ekonomi makro mempengaruhi daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Nilai tambah merefleksikan produktivitas perekonomian setidaknya dalam jangka pendek.
2. Akumulasi modal mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing dalam jangka panjang.
3. Kemakmuran suatu daerah mencerminkan kinerja ekonomi di masa lalu.
4. Kompetisi yang didorong mekanisme pasar akan meningkatkan kinerja ekonomi suatu daerah. Semakin ketat kompetisi pada suatu daerah, maka akan semakin kompetitif perusahaan-perusahaan yang akan bersaing.

## 2. Keterbukaan

Indikator keterbukaan merupakan ukuran seberapa jauh perekonomian suatu daerah berhubungan dengan daerah lain yang tercermin dari perdagangan daerah tersebut dengan daerah lain dalam cakupan nasional dan internasional. Indikator ini menentukan daya saing melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keberhasilan suatu daerah dalam perdagangan internasional merefleksikan daya saing perekonomian daerah tersebut.
2. Keterbukaan suatu daerah baik dalam perdagangan domestik maupun internasional meningkatkan kinerja perekonomiannya.
3. Investasi internasional mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien ke seluruh penjuru dunia.

4. Daya saing yang didorong oleh ekspor terkait dengan orientasi pertumbuhan perekonomian daerah.
5. Mempertahankan standar hidup yang tinggi mengharuskan integrasi dengan internasional.

### **3. Sistem Keuangan**

Indikator sistem keuangan merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non-perbankan di daerah untuk memfasilitasi aktivitas perekonomian yang memberikan nilai tambah. Sistem keuangan suatu daerah akan mempengaruhi alokasi faktor produksi yang terjadi di perekonomian daerah tersebut. Indikator sistem keuangan ini mempengaruhi daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sistem keuangan yang baik mutlak diperlukan dalam memfasilitasi aktivitas perekonomian daerah.
2. Sektor keuangan yang efisien dan terintegrasi secara internasional mendukung daya saing daerah.

### **4. Infrastruktur dan Sumber Daya Alam**

Infrastruktur dalam hal ini merupakan indikator seberapa besar sumber daya seperti modal fisik, geografis, dan sumber daya alam dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah. Indikator ini mendukung daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Modal fisik berupa infrastruktur baik ketersediaan maupun kualitasnya mendukung aktivitas ekonomi daerah.
2. Modal alamiah baik berupa kondisi geografis maupun kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga mendorong aktivitas perekonomian daerah.
3. Teknologi informasi yang maju merupakan infrastruktur yang mendukung berjalannya aktivitas bisnis di daerah yang berdaya saing.

## 5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi mengukur kemampuan daerah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi yang meningkatkan nilai tambah. Indikator ini mempengaruhi daya saing daerah melalui beberapa prinsip dibawah ini:

1. Keunggulan kompetitif dapat dibangun melalui aplikasi teknologi yang sudah ada secara efisien dan inovatif.
2. Investasi pada penelitian dasar dan aktivitas yang inovatif yang menciptakan pengetahuan baru sangat krusial bagi daerah ketika melalui tahapan pembangunan ekonomi yang lebih maju.
3. Investasi jangka panjang berupa R&D akan meningkatkan daya saing sektor bisnis.

## 6. Sumber Daya Manusia

Indikator sumber daya manusia dalam hal ini ditujukan untuk mengukur ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia. Faktor SDM ini mempengaruhi daya saing daerah berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Angkatan kerja dalam jumlah besar dan berkualitas akan meningkatkan daya saing suatu daerah.
2. Pelatihan dan pendidikan adalah cara yang paling baik dalam meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas.
3. Sikap dengan nilai yang dianut oleh tenaga kerja juga menentukan daya saing suatu daerah.
4. Kualitas hidup masyarakat suatu daerah menentukan daya saing daerah tersebut begitu juga sebaliknya.

## 7. Kelembagaan

Kelembagaan merupakan indikator yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum, dan aspek keamanan mampu mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian di daerah. Pengaruh faktor kelembagaan

terhadap daya saing daerah didasarkan pada beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Stabilitas sosial dan politik melalui sistem demokrasi yang berfungsi dengan baik merupakan iklim yang kondusif dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah yang berdaya saing.
2. Peningkatan daya saing ekonomi suatu daerah tidak akan dapat tercapai tanpa adanya sistem hukum yang baik serta penegakan hukum yang independen.
3. Aktivitas perekonomian suatu daerah tidak akan dapat berjalan secara optimal tanpa didukung oleh situasi keamanan yang kondusif.

#### **8. *Governance* dan Kebijakan Pemerintah**

Indikator *Governance* dan kebijakan pemerintah dimaksudkan sebagai ukuran dari kualitas administrasi pemerintahan daerah, khususnya dalam rangka menyediakan infrastruktur fisik dan peraturan-peraturan daerah. Secara umum pengaruh faktor *governance* dan kebijakan pemerintah bagi daya saing daerah dapat didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dengan tujuan menciptakan iklim persaingan yang sehat intervensi pemerintah dalam perekonomian sebaiknya diminimalkan.
2. Pemerintah daerah berperan dalam menciptakan kondisi sosial yang terprediksi serta berperan pula dalam meminimalkan risiko bisnis.
3. Efektivitas administrasi pemerintahan daerah dalam menyediakan infrastruktur dan aturan-aturan berpengaruh terhadap daya saing ekonomi suatu daerah.
4. Efektivitas pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi dan menyediakan informasi tertentu pada sektor swasta mendukung daya saing ekonomi suatu daerah.
5. Fleksibilitas pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan ekonomi merupakan faktor yang kondusif dalam mendukung peningkatan daya saing daerah.

## 9. Manajemen dan Ekonomi Mikro

Dalam indikator manajemen dan ekonomi mikro pengukuran yang dilakukan dikaitkan dengan pertanyaan seberapa jauh perusahaan di daerah dikelola dengan cara inovatif, menguntungkan dan bertanggung-jawab. Prinsip-prinsip yang relevan terhadap daya saing daerah diantaranya adalah:

1. Rasio harga/kualitas yang kompetitif dari suatu produk mencerminkan kemampuan managerial perusahaan-perusahaan yang berada di suatu daerah.
2. Orientasi jangka panjang manajemen perusahaan akan meningkatkan daya saing daerah dimana perusahaan tersebut berada.
3. Efisiensi dalam aktivitas perekonomian ditambah dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan adalah keharusan bagi perusahaan yang kompetitif.
4. Kewirausahaan sangat krusial bagi aktivitas ekonomi pada masa-masa awal.
5. Dalam usaha yang sudah mapan, manajemen perusahaan memerlukan keahlian dalam mengintegrasikan serta membedakan kegiatan-kegiatan usaha.

### ASPEK DAYA SAING DAERAH

Karena banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur daya saing daerah, maka ditentukan aspek tertentu yang dapat diterima secara akademis sehingga indikator yang dihasilkan tersebut dapat menggambarkan daya saing daerah tersebut. Aspek daya saing daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mencakup analisis kinerja atas 4 (empat) fokus, yaitu:

- (a) Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah;
- (b) Fokus Infrastruktur Wilayah;
- (c) Fokus Iklim Berinvestasi; dan

(d) Fokus Sumber Daya Manusia.

### **(1) Kemampuan Ekonomi Daerah**

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, sebagai berikut:

1. Tingkat Kenaikan Pendapatan Daerah
2. Tingkat stabilitas harga pangan
3. Tingkat stabilitas pasokan pangan
4. Tingkat produktivitas pertanian
5. Tingkat produktivitas peternakan
6. Cakupan Produksi daerah yang diekspor ke luar Negeri
7. Cakupan ketersediaan pasar tradisional daerah di setiap kecamatan
8. Tingkat pertumbuhan Industri Daerah
9. Tingkat kapasitas IPTEK Sistem Produksi

### **(2) Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.

1. Tingkat pengurangan luas genangan
2. Persentase keterhubungan pusat-pusat produksi di wilayah kota
3. Persentase cakupan pelayanan sistem drainase perkotaan
4. Persentase kondisi jalan kota yang baik dan sedang
5. Tingkat ketersediaan jalan di seluruh wilayah kota

6. Tingkat ketersediaan sistem informasi /data base jalan yang lengkap dan terbaru
7. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan yang layak dan memadai
8. Tingkat ketersediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
9. Cakupan pelayanan bencana kebakaran
10. Persentase Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik/perkotaan
11. Tingkat ketersediaan, publikasi dan pengembangan Sistem Informasi pembina Jasa Konstruksi (SIPJK)
12. Tingkat ketersediaan prasarana Angkutan yang terpelihara
13. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
14. Tingkat ketersediaan penunjang pengendalian simpang dan ruas jalan dalam kondisi baik
15. Tingkat ketersediaan pelayanan
16. Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marga, dll) pada jalan di wilayah kota
17. Tingkat ketersediaan fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada berbagai jenis jalan di wilayah kota
18. Tingkat pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik/Perkotaan di wilayah perkotaan
19. Persentase pengurangan sampah di perkotaan
20. Persentase pengangkutan sampah
21. Persentase pengoperasian TPA
22. Persentase berfungsinya alat sumur pantau yang terintegrasi dengan komunikasi data
23. Persentase usaha dan/atau data kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air
24. Persentase jumlah usaha/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan dan pencemaran udara

### **(3) Iklim Berinvestasi**

Indikator yang digunakan untuk mengukur daya saing daerah dalam hal iklim berinvestasi mencakup lima indikator, yaitu:

1. Tingkat pertumbuhan investasi daerah
2. Tingkat Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Persentase Bangunan yang mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Tingkat pelayanan izin usaha jasa konstruksi (IUJK)
5. Tingkat pelayanan waktu pengurusan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

### **(4) Sumber Daya Manusia**

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

## **2.3 PEMBANGUNAN EKONOMI**

Bappenas (1999) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumberdaya,

informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Sedangkan pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui otonomi daerah, pengaturan sumberdaya nasional yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintah serta layanan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah secara merata dan berkeadilan. Pembangunan adalah proses natural mewujudkan cita-cita bernegara yaitu terwujudnya masyarakat makmur sejahtera secara adil dan merata. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran yaitu meningkatnya konsumsi disebabkan meningkatnya pendapatan (Sumodiningrat 2001). Kemudian secara sederhana pembangunan diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik (Riyadi dan Bratakusumah 2003). Sedangkan Saefulhakim (2003) mengartikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang terencana (terorganisasikan) ke arah tersedianya alternatif/pilihan yang lebih banyak bagi pemenuhan tuntutan hidup yang paling manusiawi sesuai dengan tata nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Menurut Todaro (2006) bahwa pembangunan adalah proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, perilaku sosial, dan institusi nasional, disamping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan. Definisi tersebut memberikan suatu pemahaman bahwa pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Pertumbuhan dapat berupa pengembangan atau perluasan (expansion) atau peningkatan (improvement) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

Wiranto (1997) mendefinisikan pembangunan dalam konsep pembangunan yang bertumpu pada masyarakat adalah untuk

mengembangkan kehidupan suatu masyarakat dan harus dapat dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat. Pengembangan wilayah dilakukan dengan pendekatan sektoral dimana terdapat pengelompokan kegiatan dalam sektor yang kemudian di analisis agar dapat mengetahui sektor mana yang berpotensi dan dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik wilayah (Tarigan, 2005). Pembangunan sebagai suatu proses perubahan tidak akan bisa lepas dari perencanaan maka perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik (Riyadi dan Bratakusumah 2003).

Rustiadi *et al.*, (2007) mendefinisikan pembangunan sebagai upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan sebuah kondisi yang dapat menyediakan berbagai alternatif bagi pencapaian aspirasi setiap warga negara. Menurut Todaro (2006), pembangunan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan tingkat kesenjangan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran.

Keberhasilan ekonomi dapat dilihat pada proses pembangunan di masyarakat yang memiliki tujuan inti pembangunan yaitu; (1) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan, (2) Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa

peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang semua itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan, (3) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari sikap ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau Negara bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka (Todaro dan Smith, 2003).

### TEORI-TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI

Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pendapatan masyarakat diperoleh melalui proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, sehingga menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (Sukirno, 2006).

Pertumbuhan ekonomi penting untuk menciptakan kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang untuk mengurangi kemiskinan. Meskipun demikian pertumbuhan ekonomi sendiri tidak cukup, orang miskin dan orang yang rentan mungkin tidak memperoleh keuntungan dari pertumbuhan, karena mereka kurang sehat, kurang keahlian, dan

kurangnya akses terhadap infrastruktur dasar. Pemberdayaan sangat penting bagi penduduk miskin untuk mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang diciptakan dengan adanya pertumbuhan (Putra, 2016).

#### A. TEORI PERTUMBUHAN ROWTOW

Dalam teori ini dikatakan bahwa proses pembangunan bersifat universal dengan tahap-tahap yang sama dan bersifat linear. Proses pembangunan yang universal tersebut akan melalui lima tahap, yaitu: (1) masyarakat tradisional (*traditional society*); (2) prasyarat untuk tinggal landas (*precondition for take off*); (3) tinggal landas (*take off*); (4) menuju kedewasaan (*drive to maturity*); dan (5) konsumsi massa yang tinggi (*high mass consumption*) (Damanhuri et al., 1997).

##### 1. Masyarakat Tradisional

Pada tahap ini, dicirikan masih adanya stagnasi dalam produktivitas, masyarakat bercorak agraris, struktur sosial hirarkis, dan peluang meraih kemajuan bersifat terbatas (Damanhuri et al., 1997). Sebenarnya, banyak tanah dapat digarap, skala dan pola perdagangan dapat diperluas, manufaktur dapat dibangun dan produktivitas pertanian dapat ditingkatkan sejalan dengan peningkatan penduduk dan pendapatan nyata. Tetapi fakta menunjukkan bahwa keinginan untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern secara teratur dan sistematis bertumpuk pada adanya suatu batas, yaitu tingkat *output* per kapita yang dapat dicapai (Jinghan, 2004).

##### 2. Masyarakat Prasyarat untuk Lepas Landas (*precondition for take-off*)

Pada tahap ini, ciri masyarakat tradisional mulai luntur dan “*the idea of progress*” telah mulai tumbuh, kemudian kegiatan pendidikan telah menyesuaikan terhadap kebutuhan kegiatan ekonomi modern. Tabungan masyarakat, kegiatan investasi, perdagangan (nasional dan internasional) semakin penting. Kemudian, bentuk negara yang terdesentralisasi dikerahkan untuk menghadapi kekuatan yang menghambat pembangunan.

Dan, pembangunan infrastruktur (jalan, komunikasi, dan seterusnya) sangat diprioritaskan.

### 3. Masyarakat Lepas Landas (*take-off*)

Masyarakat secara keseluruhan telah berhasil menyingkirkan halangan-halangan yang dapat mengganggu pertumbuhan yang reguler. Pada tahap ini, terdapat tiga kondisi yang harus dipenuhi: (1) tingkat investasi sekitar 10 persen dari PDB yang dapat menyamai pertumbuhan produksi riil per kapita, (2) penciptaan sebanyak mungkin sektor industri yang menjadikan sektor ini memainkan peran menentukan untuk pertumbuhan yang tinggi, dan (3) terdapatnya instrumen politik, sosial, dan institusional yang memudahkan proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi, tinggal landas tersebut didahului oleh suatu rangsangan atau dorongan kuat, seperti perkembangan suatu sektor penting atau revolusi politik yang membawa perubahan mendasar dalam proses produksi, atau kenaikan proporsi investasi neto menjadi lebih dari 10 persen dari pendapatan nasional yang melampaui pertumbuhan penduduk.

### 4. Masyarakat Menuju Kedewasaan (*drive to maturity*)

Pada tahap ini, dicirikan adanya: (1) kemajuan teknologi ditopang oleh struktur industri yang dominan, (2) teknologi modern telah mengendalikan semua sektor ekonomi, (3) struktur produksi ditandai oleh dominannya industri berat dan barang-barang modal (*capital goods*) telah secara penuh diproduksi dalam negeri. Pada waktu suatu negara berada pada tahap kedewasaan teknologi, ada tiga perubahan penting yang terjadi:

- a. Sifat tenaga kerja berubah. Ia berubah menjadi terdidik. Orang lebih suka tinggal atau hidup di kota daripada di desa. Upah nyata mulai meningkat dan para pekerja mengorganisasi diri untuk mendapatkan jaminan sosial dan ekonomi yang lebih besar.
- b. Watak para pengusaha berubah. Pekerja keras dan kasar berubah menjadi manajer efisien yang halus dan sopan.

c. Masyarakat merasa bosan pada keajaiban industrialisasi dan menginginkan sesuatu yang baru menuju perubahan lebih jauh.

#### 5. Konsumsi Massa yang Tinggi (*high mass consumption*)

Ciri yang menonjol pada tahap ini adalah berkembangnya produksi barang-barang konsumsi tahan lama (*durable consumption goods*) dan jasa (*service*) menjadi sektor ekonomi yang utama dan secara massal masyarakat mempunyai tingkat daya beli dan tingkat kemampuan berkonsumsi berbagai tingkat kebutuhan (primer, sekunder, tersier) yang sangat tinggi.

### B. TEORI PERTUMBUHAN KUZNET

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro, 2003). Masing-masing dari ketiga komponen pokok dari definisi itu sangat penting untuk diketahui terlebih dahulu, yaitu:

1. Kenaikan *output* secara berkesinambungan adalah manifestasi dari apa yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis barang merupakan tanda kematangan (*economic maturity*) dari suatu negara.
2. Perkembangan teknologi merupakan dasar bagi berlangsungnya suatu pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Ini adalah suatu kondisi yang sangat diperlukan, tetapi tidak cukup itu saja (jadi, disamping perkembangan atau kemajuan teknologi masih dibutuhkan faktor-faktor lain).
3. Guna mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung di dalam teknologi baru, maka perlu diadakan serangkaian penyesuaian

kelembagaan, sikap, dan ideologi. Inovasi dibidang teknologi tanpa diikuti dengan inovasi sosial sama halnya dengan lampu pijar tanpa listrik (potensi ada, akan tetapi tanpa *input* komplementernya maka hal itu tidak bisa membuahkan hasil apapun).

Pertumbuhan ekonomi modern merupakan pertanda penting di dalam kehidupan perekonomian. Menurut Kuznets, terdapat enam ciri pertumbuhan ekonomi modern yang muncul dalam analisis yang didasarkan pada produk nasional dan komponennya, penduduk, dan tenaga kerja. Dari keenam ciri itu, dua diantaranya adalah kuantitatif yang berhubungan dengan pertumbuhan produksi nasional dan pertumbuhan penduduk, yang dua lainnya berhubungan dengan peralihan struktural dan dua lagi dengan penyebaran internasional (Jinghan, 2004).

Keenam ciri tersebut ialah: (1) Laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita: pertumbuhan ekonomi modern ditandai dengan laju kenaikan produk per kapita yang tinggi diikuti dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat; (2) Peningkatan produktivitas: pertumbuhan ekonomi modern terlihat dari semakin meningkatnya laju produk per kapita terutama sebagai akibat adanya perbaikan kualitas input yang meningkatkan efisiensi atau produktivitas per unit input; (3) Laju perubahan struktural yang tinggi: perubahan struktural dalam pertumbuhan ekonomi modern mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke non-pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produksi dan peralihan dari perusahaan perseorangan menjadi perusahaan berbadan hukum, serta perubahan status kerja buruh; (4) Urbanisasi: pertumbuhan ekonomi modern ditandai pula dengan semakin banyaknya penduduk dari perdesaan ke daerah perkotaan. (5) Ekspansi negara maju: pertumbuhan ekonomi modern terpusat di negara Eropa dan jajahannya di seberang lautan. Ekspansi negara-negara maju yang bermula dari bangsa-bangsa Eropa akibat revolusi teknologi dibidang transportasi dan komunikasi. (6) Arus barang, modal, dan orang antar bangsa: pertumbuhan ekonomi modern

menunjukkan bahwa telah terjadi arus barang, modal, dan orang antar bangsa yang semakin meningkat sejak kuartal kedua abad ke-19 sampai perang dunia pertama (PD 1) tetapi mulai mundur pada PD 1 dan berlanjut sampai akhir PD II.

### C. DOKTRIN PERTUMBUHAN BERIMBANG

Doktrin pertumbuhan berimbang dianut oleh beberapa penulis yang masing-masing mempunyai tafsiran sendiri diantaranya Rosenstein-Rodan, Ragnar Nurkse, dan Arthur Lewis.. Bagi beberapa penulis, berarti investasi di sektor atau industri berlangsung lambat agar bisa sejalan dengan sektor lain. Bagi sebagian lainnya, ia berarti bahwa investasi harus berlangsung secara serentak di semua sektor atau industri. Pengertian lain adalah pembangunan berimbang antara industri manufaktur dan pertanian (Jinghan, 2004).

Pertumbuhan berimbang, karena itu, membutuhkan keseimbangan antara berbagai industri barang konsumen, dan antara barang konsumen dengan industri barang modal. Ia juga berarti keseimbangan antara industri dan pertanian, dan antara sektor dalam negeri dan sektor ekspor. Lebih lanjut, ia memerlukan pula keseimbangan antara *overhead* sosial dan *overhead* ekonomi dan dengan investasi langsung produktif, dan antara ekonomi eksternal vertikal dan ekonomi eksternal horizontal. Singkatnya, teori pertumbuhan berimbang mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis dari berbagai sektor ekonomi sehingga semua sektor tumbuh bersama.

Untuk itu, diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi meningkatkan penawaran barang. Ini meliputi pembangunan serentak dan harmonis dari barang setengah jadi, bahan mentah, tenaga, pertanian,

pengairan, angkutan dan lain-lain, serta semua industri yang memproduksi barang konsumen. Sebaliknya, sisi permintaan berhubungan dengan penyediaan kesempatan lapangan kerja yang lebih besar dan penambahan penghasilan agar permintaan barang dan jasa dapat tumbuh di pihak penduduk. Sisi ini berkaitan dengan industri yang sifatnya saling melengkapi, industri barang konsumen, khususnya pertanian, dan industri manufaktur. Jika semua industri dibangun secara serentak maka jumlah tenaga yang terserap akan sangat besar. Dengan cara ini akan tercipta barang-barang dari masing-masing industri satu sama lain, dan semua barang akan menjadi habis terjual.

#### D. KONSEP PERTUMBUHAN TIDAK BERIMBANG

Konsep “pertumbuhan tidak berimbang” dipopulerkan oleh Prof. A.O. Hirschman. Ia berpendapat bahwa dengan sengaja tidak menyeimbangkan perekonomian, sesuai dengan strategi yang dirancang sebelumnya, adalah cara yang terbaik untuk mencapai pertumbuhan pada suatu negara terbelakang.

Menurut Hirschman, investasi seyogyanya dilakukan pada sektor yang terpilih daripada secara serentak di semua sektor ekonomi. Tidak ada satu pun negara terbelakang yang mempunyai modal dan sumber lain dalam kuantitas sedemikian besar untuk melakukan investasi secara serentak pada semua sektor. Oleh karena itu, investasi harus dilakukan pada beberapa sektor atau industri yang terpilih saja agar cepat berkembang dan hasil ekonominya dapat digunakan untuk pembangunan sektor lain. Dengan demikian perekonomian secara berangsur bergerak dari lintasan pertumbuhan tak berimbang ke arah pertumbuhan berimbang. Ahli ekonomi seperti Singer, Kindleberger, Streeten, dan lain-lain, mengungkapkan pendapat mereka yang mendukung doktrin pertumbuhan tidak berimbang tersebut yang sebenarnya merupakan kritik terhadap teori pertumbuhan berimbang. Meskipun demikian, Rostow dan Hirschmanlah

yang telah mengemukakan doktrin pertumbuhan tidak berimbang ini dengan cara yang sistematis (Jinghan, 2004).

### E. PERTUMBUHAN DARI DALAM

Salah satu teori pertumbuhan regional yang paling sederhana adalah apa yang dinamakan teori sektor. Teori ini timbul dari pengamatan empirik yang dilakukan oleh Clark dan Fisher bahwa kenaikan pendapatan per kapita di berbagai daerah pada berbagai waktu pada umumnya diikuti oleh realokasi sumber daya, dengan penurunan proporsi angkatan kerja yang dipekerjakan dalam kegiatan-kegiatan primer (pertanian), dan kenaikan proporsi dalam kegiatan-kegiatan sekunder (manufakturing) dan kemudian disusul dengan kenaikan proporsi dalam kegiatan-kegiatan tersier (jasa). Laju terjadinya perubahan sektor seperti itu, dan evolusi spesialisasi dan pembagian kerja intern yang diakibatkannya, dipandang sebagai sumber dinamika bagi pertumbuhan regional (Glasson, 1977).

Laju perubahan peranan relatif dari berbagai sektor dijelaskan melalui elastisitas pendapatan dari permintaan terhadap produk mereka dan melalui perbedaan laju perubahan produktivitas tenaga kerja. Dengan naiknya pendapatan, permintaan terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh sektor-sektor sekunder dan tersier akan mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada permintaan terhadap produk-produk primer, dan demikian menyebabkan terjadinya perubahan dan pengalihan dari sektor-sektor dimana terdapat imbalan yang rendah ke sektor-sektor dimana terdapat imbalan (*reward*) yang tinggi.

Suatu perluasan dari teori pokok ini adalah teori tahap (*stages theory*) yang mengatakan bahwa perkembangan regional adalah terutama suatu proses evolusioner intern dengan tahap-tahap sebagai berikut (Glasson, 1977):

- a) Tahap pertama adalah tahap perekonomian subsistem swasembada, dimana hanya terdapat sedikit investasi atau perdagangan. Lapisan

- penduduk pertanian yang merupakan basis distribusi menurut lokasi sumber daya alam;
- b) Dengan kemajuan pengangkutan daerah yang bersangkutan mengembangkan perdagangan dan spesialisasi. Muncullah lapisan kedua yang mengusahakan industri desa sederhana untuk memenuhi kebutuhan para petani. Karena pada mulanya semua bahan, pasar, dan tenaga kerja disediakan oleh penduduk pertanian, maka lapisan baru ini berlokasi pada tempat yang berkaitan dengan lapisan basis.
  - c) Dengan semakin bertambahnya perdagangan inter-regional, daerah yang bersangkutan maju melalui suatu urutan perubahan tanaman pertanian dari pengembalaan ternak yang ekstensif ke tanaman biji-bijian ke peternakan intensif dan penanaman buah-buahan.
  - d) Dengan semakin bertambahnya penduduk dan semakin berkurangnya tambahan hasil pertanian, daerah yang bersangkutan terpaksa melakukan industrialisasi. Industri sekunder berkembang, mula-mula mengolah produk-produk primer tetapi kemudian semakin lebih berspesialisasi (Ketiadaan industrialisasi mengakibatkan terjadinya tekanan penduduk, menurunnya taraf hidup dan stagnasi dan kemerosotan umum).
  - e) Tahap terakhir adalah pengembangan industri tersier yang memproduksi untuk ekspor. Daerah perkembangan seperti itu mengeksport model, ketrampilan dan jasa-jasa yang bersifat khusus ke daerah-daerah yang berkembang.

### FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor ekonomi dan non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, teknologi dan sebagainya. Semua itu merupakan faktor ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial,

kondisi politik, dan nilai-nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang. Di dalam pertumbuhan ekonomi, lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral dan kondisi politik dan kelembagaan merupakan faktor non ekonomi.

## 1. Faktor Ekonomi

### a. Sumber Alam

Sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam cenderung lebih mudah untuk meningkatkan pertumbuhannya dibandingkan dengan negara yang tidak mempunyainya, dengan asumsi faktor lainnya adalah konstan (Hakim A, 2004). Sebagaimana yang dikatakan Lewis, “Dengan hal-hal lain yang sama, orang dapat mempergunakan dengan lebih baik kekayaan alamnya dibanding apabila mereka tidak memilikinya” (Jinghan, 2004).

### b. Akumulasi Modal

Modal adalah persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini disebut akumulasi modal atau pembentukan modal.

### c. Organisasi

Organisasi berhubungan dengan penggunaan faktor produksi didalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitasnya.

### d. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil Pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan produktivitas buruh, modal, dan faktor produksi yang lain.

e. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri.

2. Faktor Non ekonomi

a. Faktor Sosial

Faktor sosial juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dan kebudayaan Barat membawa ke arah penalaran (*reasoning*) dan skeptisisme. Ia menanamkan semangat yang menghasilkan berbagai penemuan baru dan akhirnya memunculkan kelas pedagang baru. Kekuatan faktor ini menghasilkan pandangan, harapan, struktur, dan nilai-nilai sosial.

b. Faktor Manusia

Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah sumber daya manusia saja, tetapi lebih menekankan pada efisiensi mereka.

c. Faktor Politik dan Administratif

Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pertumbuhan ekonomi negara terbelakang. Administrasi yang kuat, efisien, dan tidak korup, dengan demikian amat penting bagi pembangunan ekonomi.

### INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka makro ekonomi daerah berisi isu-isu perekonomian dalam konstelasi eksternal maupun internal. Lebih jauh, kerangka ekonomi makro membahas kondisi perekonomian suatu daerah menyangkut permasalahan yang tengah dihadapi, serta tantangan yang akan dihadapi kedepan. Kondisi makro ekonomi tersebut disajikan dalam bentuk data dan fakta berupa uraian faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian suatu daerah serta beberapa variabel dan indikator yang menggambarkan kondisi

perekonomiannya. Indikator Ekonomi Makro Daerah yang sering digunakan adalah:

1. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Indikator Inflasi
3. Indikator PDRB (atas dasar harga Berlaku)
4. Indikator Jumlah Penduduk
5. Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk
6. Indikator Jumlah Pengangguran
7. Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi
8. Indikator Jumlah Penduduk Miskin
9. Indikator Ketenagakerjaan
10. Indikator Upah Minimum Regional
11. Indikator Investasi Daerah
12. Indikator Kemandirian Daerah

### **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana suatu negara (wilayah) telah menggunakan sumber daya penduduknya untuk meningkatkan mutu kehidupan warga negara (wilayah) tersebut. Isu yang kemudian berkembang adalah bahwa keberhasilan meningkatkan prestasi ekonomi suatu negara atau wilayah ke tingkat yang lebih tinggi tidak selalu diikuti oleh meningkatnya mutu kehidupan warga masyarakatnya.

Penyusunan IPM didasarkan pada tiga komponen, yaitu angka harapan hidup ( $e_0$ ), pencapaian pendidikan, yang diukur dengan angka harapan lama sekolah (AHS) dan rata-rata lama sekolah (MYS), serta daya beli atau *Purchasing Power Parity* (PPP). Penggunaan komponen-komponen tersebut mengikuti pembakuan komponen yang dilakukan oleh UNDP. Dengan demikian sejauh mungkin hasilnya terbandingkan secara

internasional, nasional dan daerah. Rasionalitas pemilihan komponen tersebut dibahas dalam laporan HDR (UNDP) yang dipublikasikan setiap tahun sejak 1990 yang mempertimbangkan antara lain:

- (a) Makna dari masing-masing indikator dalam kaitannya dengan konsep pembangunan manusia versi UNDP.
- (b) Ketersediaan data secara internasional.

Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksinya sehingga bernilai antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Lebih lanjut komponen angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah digabung menjadi satu sebagai indikator pendidikan (pengetahuan) dengan perbandingan 2:1. dalam penyajiannya indeks tersebut dikalikan 100 untuk mempermudah penafsiran. Teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti formulasi sebagai berikut:

$$IPM = \frac{1}{3} [Indeks X_1 + Indeks X_2 + Indeks X_3]$$

$$Indeks X_{(i,j)} = \frac{X_{(i,j)} - X_{(i-min)}}{X_{(i-max)} - X_{(i-min)}}$$

Dengan :

$X_{(i,j)}$  = Nilai komponen IPM ke-i

$X_{(i-min)}$  = Nilai komponen IPM ke-i yang terendah

$X_{(i-max)}$  = Nilai komponen IPM ke-i yang tertinggi

### Inflasi

Dalam ilmu ekonomi, Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat

adanya ketidاكلancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.

Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, pertama yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan (tekanan) produksi dan/atau distribusi (kurangnya produksi (product or service) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi). Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah (*government*) seperti fiskal, kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dan lain-lain.

Inflasi tarikan permintaan (*demand pull inflation*) terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi *full employment* dimana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang

berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.

Inflasi desakan biaya terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidاكلancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi (pabrik, perkebunan, dll), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tersebut, aksi spekulasi (penimbunan), dll, sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.

Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya:

- a. Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI), adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.
- b. Indeks biaya hidup atau *cost-of-living index* (COLI).
- c. Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK di masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan

biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.

- d. Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.
- e. Indeks harga barang-barang modal
- f. Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.

Secara garis besar dampak inflasi terhadap perekonomian antara lain:

- a. terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara, karena berkurangnya investasi dan berkurangnya minat menabung.
- b. masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang, karena harga barang mengalami kenaikan.
- c. jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, maka akan terjadi pengangguran, karena pemerintah berusaha untuk menekan harga.
- d. masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang.
- e. nilai mata uang turun, karena adanya kenaikan harga barang.

### **Produk Domestik Regional Bruto**

Gambaran secara menyeluruh tentang kondisi perekonomian suatu daerah dapat diperoleh dari PDRB. Sebagai salah satu indikator makro ekonomi, PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto didefinisikan sebagai jumlah barang-barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu daerah pada periode tertentu, biasanya satu tahun. Nilai pendapatan nasional yang dihasilkan merupakan nilai pasar dari barang dan jasa. Nilai pasar tersebut dalam arti nilai kotor atau bruto, karena tidak seluruh produk yang dihasilkan pada periode tertentu

merupakan penambahan pada produk yang ada, khususnya untuk barang modal. Sebagian besar dari produk baru yang dihasilkan merupakan penggantian dari produk lama yang nilai ekonomisnya telah habis pakai pada proses produksi. Jenis investasi yang merupakan penggantian barang modal yang lama merupakan pengertian dari investasi bruto. Untuk mengubah investasi bruto menjadi investasi neto, maka nilai investasi bruto harus dikurangi dengan penyusutan (depresiasi) barang modal tersebut.

Dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto, yang dihitung hanyalah barang akhir (*final goods*) sedangkan barang antara (*intermediary goods*) tidak dihitung dalam pendapatan nasional. Barang akhir merupakan barang yang langsung dikonsumsi dan tidak digunakan sebagai *input* pada proses produksi selanjutnya, sedangkan barang antara merupakan barang yang digunakan sebagai *input* pada proses produksi selanjutnya. Hal ini untuk menghindari suatu produk diperhitungkan berkali-kali dalam perhitungan pendapatan nasional. Dalam kenyataannya, sangat sulit membedakan barang antara dan barang akhir. Roti tawar misalnya, bagi rumah tangga, roti tawar merupakan barang akhir yang akan langsung dikonsumsi dan roti tawar ini tidak dipergunakan sebagai *input* untuk membuat produk lain. Sebaliknya roti tawar bagi pedagang roti bakar merupakan barang antara karena roti tawar digunakan sebagai salah satu *input* dalam membuat roti bakar.

Produk Domestik Regional Bruto dihitung berdasarkan periode tertentu, biasanya periode perhitungannya secara tahunan. Dengan perhitungan periodik secara tahunan, pendapatan nasional dapat digunakan untuk menunjukkan perkembangan perekonomian suatu negara dari waktu ke waktu.

Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, PDRB merupakan indikator untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan.

Ada dua metode dalam penghitungan PDRB adalah (Dumairy, 1996):

#### a. Metode Langsung

Metode langsung didasarkan pada data yang terpisah antara data daerah dan data nasional, sehingga hasil perhitungannya mencakup seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah. Metode ini dalam penghitungan PDRB menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

##### 1. Pendekatan Produksi

Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu adalah sebagai dasar penghitungan PDRB nya. Unit-unit produksi dimaksud secara garis besar dipilah-pilah menjadi 11 sektor (dapat juga dibagi menjadi 9 sektor) yaitu: (1) pertanian; (2) pertambangan dan galian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas, dan air minum; (5) bangunan; (6) perdagangan; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) bank dan

lembaga keuangan lainnya; (9) sewa rumah; (10) pemerintah; (11) jasa-jasa.

## 2. Pendekatan Pendapatan

Jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu setahun adalah sebagai dasar penghitungan PDRBnya. Balas jasa produksi meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semuanya dihitung sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam hal ini mencakup juga penyusutan dan pajak-pajak tak langsung netto. Jumlah komponen semua pendapatan per sektor disebut nilai tambah bruto sektoral. Oleh sebab itu, PDRB menurut pendekatan pendapatan merupakan penjumlahan dari nilai tambah bruto seluruh sektor atau lapangan usaha.

## 3. Pendekatan Pengeluaran

Jumlah seluruh komponen permintaan akhir yang meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan, pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stok, pengeluaran konsumsi pemerintah, dan ekspor netto (ekspor-impor) yang semuanya berada dalam jangka satu tahun adalah sebagai dasar penghitungan PDRBnya.

### b. Metode Tidak Langsung atau Alokasi

Metode tidak langsung atau alokasi ini dalam menghitung PDRB dilakukan dengan cara menghitung nilai tambah suatu kelompok kegiatan ekonomi dengan mengalokasikan nilai tambah nasional ke dalam masing-masing ekonomi pada tingkat regional. Sebagai alokator

digunakan indikator yang paling besar pengaruhnya atau erat kaitannya dengan produktivitas kegiatan ekonomi tersebut.

PDRB yang disajikan atas dasar harga konstan, akan menggambarkan tingkat pertumbuhan riil perekonomian suatu daerah baik secara agregat maupun sektoral. Pertumbuhan perekonomian yang timbul tersebut apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk masing-masing tahun, maka akan dapat pula mencerminkan tingkat perkembangan pendapatan perkapita penduduk. Jika pendapatan perkapita penduduk suatu daerah dibandingkan dengan pendapatan per kapita daerah lain, maka angka-angka tersebut dapat dipakai sebagai indikator untuk membandingkan tingkat kemakmuran material dengan daerah lainnya.

Penyajian PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan, juga dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat inflasi ataupun deflasi yang terjadi. Demikian pula apabila disajikan secara sektoral akan dapat juga memberi gambaran tentang struktur perekonomian suatu daerah.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan

pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.

Dengan perkataan lain bahwa pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitative change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan atau nilai akhir pasar (*total market value*) dari barang-barang akhir dan jasa-jasa (*final goods and services*) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Perlu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi, kedua istilah ini mempunyai arti yang sedikit berbeda. Kedua-duanya memang menerangkan mengenai perkembangan ekonomi yang berlaku. Tetapi biasanya, istilah ini digunakan dalam konteks yang berbeda. Pertumbuhan selalu digunakan sebagai suatu ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan sesuatu negara, yang diukur melalui persentasi pertambahan pendapatan nasional riil. Istilah pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Dengan perkataan lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ahli ekonomi bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha merombak sektor pertanian yang tradisional, masalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah pemerataan pembagian pendapatan (Sukirno, 2006)

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangannya baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun

berikutnya. Oleh karena itu, untuk melihat peningkatan jumlah barang yang dihasilkan maka pengaruh perubahan harga-harga terhadap nilai pendapatan daerah pada berbagai tahun harus dihilangkan. Caranya adalah dengan melakukan perhitungan pendapatan daerah didasarkan atas harga konstan.

Melalui model input output regional, perencana daerah dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang mampu mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain dengan cepat atau sering dikenal dengan istilah "sektor unggulan". Proses identifikasi tersebut menggunakan analisis keterkaitan antar sektor (*inter industrial linkages analysis*). Keterkaitan tersebut berupa keterkaitan ke depan (*forward linkages*) maupun keterkaitan ke belakang (*backward linkages*). Dalam hal ini sektor unggulan diartikan sebagai sektor yang mempunyai tingkat keterkaitan ke depan dan ke belakang yang tinggi. Disebut sektor unggulan karena sektor tersebut mampu mendorong pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang mensuplai inputnya maupun sektor yang memanfaatkan output sektor unggulan tersebut sebagai input dalam proses produksinya.

Sektor yang mempunyai keterkaitan ke depan tinggi berarti pada daerah tersebut merupakan pasar output yang potensial bagi sektor tersebut. Sektor yang mempunyai keterkaitan ke belakang tinggi berarti pada daerah tersebut merupakan penyedia input yang potensial bagi sektor tersebut.

Dengan memanfaatkan matrik berikut ini maka selanjutnya dapat menentukan sektor apa yang memiliki keterkaitan ke depan maupun ke belakang yang tinggi (cenderung terjadi konglomerasi) maupun sektor yang hanya tinggi salah satu keterkaitannya saja (cenderung berisiko dan cenderung prospektif). Dengan matrik tersebut juga dapat diketahui sektor-sektor yang mempunyai nilai keterkaitan ke depan dan ke belakang

yang rendah (*footloose*, bukan pasar bagi output maupun penyedia input pada daerah tersebut).

Melalui angka pengganda produksi atau output (*output multiplier*), perencana daerah dapat menentukan sektor-sektor yang mempunyai potensi besar dalam menunjang pertumbuhan output perekonomian daerah. Dengan angka pengganda ini dapat dilihat kemampuan suatu sektor dalam mendorong penciptaan output baru apabila terdapat suatu perubahan permintaan dalam suatu perekonomian. Sektor yang memiliki nilai angka pengganda output tinggi merupakan sektor yang berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Rekomendasi yang dapat ditarik dari analisis angka pengganda ini adalah efek maksimum dalam hal perubahan output akan tercipta apabila setiap satuan uang untuk permintaan akhir dibelanjakan untuk membeli output yang mempunyai angka pengganda terbesar. Sedikit saja komponen permintaan akhir tersebut dipakai untuk membeli output yang mempunyai angka pengganda lebih kecil maka efek maksimal dari tambahan permintaan akhir tersebut tidak akan tercapai. Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun dengan rumus:

$$G_t = \frac{Y_{r_t} - Y_{r_{t-1}}}{Y_{r_{t-1}}} \times 100$$

$G_t$  : pertumbuhan ekonomi tahun t

$Y_{r_t}$  : pendapatan nasional tahun t

$Y_{r_{t-1}}$  : pendapatan nasional tahun t-1 (tahun sebelumnya)

### Teori Ketenagakerjaan

Tenaga kerja dapat digolongkan menjadi tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja tidak terdidik. Menurut [Simanjuntak \(1998\)](#), kedua bentuk tenaga kerja tersebut berbeda dalam beberapa hal. *Pertama*, tenaga terdidik pada

umumnya mempunyai produktivitas kerja lebih tinggi daripada yang tidak terdidik. Produktivitas pekerja pada dasarnya tercermin dalam tingkat upah dan penghasilan pekerja, yaitu berbanding lurus dengan tingkat pendidikannya. *Kedua*, dari segi waktu, *supply* tenaga kerja terdidik haruslah melalui proses pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, elastisitas *supply* tenaga kerja terdidik biasanya lebih kecil daripada elastisitas *supply* tenaga kerja tidak terdidik. *Ketiga*, dalam proses pengisian lowongan, pengusaha memerlukan lebih banyak waktu untuk menyeleksi tenaga kerja terdidik daripada tenaga kerja tidak terdidik.

Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja, pada suatu tingkat upah keseimbangan tersebut dapat berubah lebih besarnya penawaran dibandingkan permintaan terhadap tenaga kerja (adanya *excess supply of labour*) dan, lebih besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja (adanya *excess demand of labour*).

Ada dua teori penting dalam kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan.

1. Teori **Lewis (1959)**, yang mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain. Ada dua struktur di dalam perekonomian Negara, yaitu:
  - 1) Sektor kapitalis modern
  - 2) Sektor subsistem
2. Teori **Fei-Ranis (1964)**, yang berkaitan dengan Negara berkembang yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Sumber Daya Alamnya belum dapat di olah, sebagian penduduknya bergerak di sektor pertanian, banyak pengangguran, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Menurutnya ada tiga tahap pembangunan ekonomi dalam kondisi kelebihan buruh:

- a. Dimana para pengangguran semu (yang tidak menambah output pertanian), dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama.
- b. Tahap dimana pekerja pertanian menambah output tetapi memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh, dialihkan pula ke sektor industri.
- c. Tahap ditandai oleh awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan output lebih besar dari pada perolehan upah institusional.

Beberapa pengertian yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, yaitu:

1. Tenaga Kerja (*Manpower*)

Penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun), atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja merek, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

2. Angkatan Kerja (*Labour Force*)

Bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu produksi barang dan jasa.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (*Labour Force Participation rate*)

Menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umum sebagai persentase penduduk dalam kelompok umum tersebut.

4. Tingkat Pengangguran (*Unemployment Rate*)

Angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Pengertian menganggur disini adalah aktif mencari pekerjaan.

5. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*)

Bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan.

6. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*)

Perbedaan antara jumlah pekerjaan yang betul dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya dengan jumlah pekerjaan yang normal mampu dan ingin dikerjakannya.

7. Setengah Menganggur Yang Kentara (*Visible Underemployment*)

Jika seseorang bekerja tidak tetap (part time) di luar keinginannya sendiri, atau bekerja dalam waktu yang lebih pendek dari biasanya.

8. Setengah Menganggur Yang Tidak Kentara (*Invisible Unemployment*)

Jika seseorang bekerja secara penuh (fill time) tetapi pekerjaannya itu dianggap tidak mencukupi, karena pendapatannya yang terlalu rendah atau pekerjaan tersebut tidak memungkinkan nya untuk mengembangkan seluruh keahliannya.

9. Pengangguran Tidak Kentara (*Disguised Unemployment*)

Dalam angkatan kerja mereka di masukkan dalam kegiatan bekerja, tetapi sebetulnya mereka adalah pengangguran jika di lihat dari segi produktivitasnya.

10. Pengangguran Friksional

Pengangguran yang terjadi akibat pindah nya seseorang dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, dan akibatnya harus mempertenggang waktu dan berstatus sebagai pengangguran sebelum mendapatkan pekerjaan yang lain tersebut.

## 11. Pengangguran Struktural

Pengangguran yang disebabkan karena ketidakcocokan antara struktur para pencari kerja—sehubungan dengan keterampilan, bidang keahlian, maupun daerah lokasinya—dengan struktur permintaan tenaga kerja yang belum terisi.

Peningkatan kualitas kerja yang dicerminkan oleh tingkat pendidikan rata-rata yang semakin baik, memberi dampak positif terhadap produktivitas tenaga kerja, begitu pula dengan upaya peningkatan keterampilan dan pelatihan tenaga kerja yang disertai dengan penerapan teknologi yang sesuai.

Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja).

### Pengangguran

Penganggur terbuka adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, atau tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, atau tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (BPS, 2016).

Berdasarkan alasan menganggur, terdapat beberapa jenis pengangguran: (1) pengangguran friksional, yakni pengangguran yang disebabkan oleh perputaran normal tenaga kerja; (2) pengangguran struktural, yakni pengangguran yang disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara

struktur penawaran tenaga kerja dengan struktur permintaan tenaga kerja; dan (3) pengangguran siklis, yakni pengangguran yang disebabkan oleh siklus bisnis yang mengalami periode resesi (Lipsey et al., 1995). Sukirno (2006) menyatakan bahwa efek buruk dari pengangguran adalah berkurangnya tingkat pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran atau kesejahteraan.

### **Kemiskinan**

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan merupakan persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk total di suatu daerah (BPS, 2016). Di Indonesia digunakan ukuran garis kemiskinan untuk mengategorikan orang miskin, yakni mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Sudantoko (2009) mengategorikan kemiskinan menjadi kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, kemiskinan struktural, kemiskinan dengan pendekatan pendapatan/pengeluaran, kemiskinan dengan pendekatan rata-rata per kapita dan kemiskinan dengan pendekatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Namun pada umumnya, kemiskinan dapat dikategorikan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif adalah ketimpangan distribusi pendapatan yang memengaruhi kondisi masyarakat, disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, sedangkan kemiskinan absolut ditentukan dengan keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum yang merupakan ukuran finansial dalam bentuk uang.

Menurut Benyamin White, "yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tingkat kesejahteraan masyarakat terdapat perbedaan kriteria dari satu wilayah dengan wilayah lain". Dan menurut M. Jauhari Wira Karta Kesuma, "kemiskinan adalah tentang adanya penambahan kesejahteraan penduduk di kota yang terus meningkat, sementara penduduk yang berada di pedesaan relatif stabil ataupun menurun serta belum terlihat kecenderungan untuk membaik." Menurut Prof. Mubiyarto menyebutkan bahwa pengertian kemiskinan tersebut adalah rendahnya taraf kehidupan suatu masyarakat baik yang berada di pedesaan maupun yang berada di daerah perkotaan.

Menurut (BPS dan Depsos, 2002) Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Menurut (SMERU dalam Suharto *et al.*, 2004) Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

### Teori Investasi

Dalam teori ekonomi secara umum, investasi diartikan sebagai penanaman dalam bentuk barang modal riil (Siamat, 2001). Beberapa pengertian investasi:

- Investasi adalah suatu kegiatan yang menunda konsumsi/penggunaan sejumlah dana pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang (Putra, 2003)
- Investasi adalah penanaman dana dalam berbagai jenis portofolio surat berharga (Siamat, 2001)
- Investasi adalah penggunaan untuk objek-objek tertentu dengan tujuan bahwa nilai objek tersebut selama jangka waktu investasi akan meningkat, paling tidak bertahan dan selama jangka waktu itu pula memberikan hasil secara teratur (Koetin, 2002)
- Investasi adalah pembelian oleh perorangan atau institusi yang berhubungan dengan keuangan atau kepemilikan yang menghasilkan pengembalian yang sepadan karena mengambil resiko selama periode atau waktu yang panjang (Amling, 1988)

Secara umum terdapat dua jenis investasi, yaitu investasi yang terdorong dan investasi otonom. Investasi yang terdorong yakni investasi yang tidak diadakan akibat adanya penambahan permintaan, pertambahan permintaan yang di akibatkan pertambahan pendapatan. Jelasnya apabila pendapatan bertambah, maka tambahan permintaan akan di gunakan untuk konsumsi, sedang pertambahan konsumsi pada dasarnya adalah tambahan permintaan. Sudah pasti apabila ada tambahan permintaan, maka akan mendorong berdirinya pabrik baru atau memperluas pabrik lama untuk dapat memenuhi tambahan permintaan tersebut.

Investasi otonom yaitu investasi yang di laksanakan atau diadakan secara bebas, artinya investasi yang di adakan bukan karena pertambahan permintaan efektif, tetapi justru untuk menciptakan atau menaikkan permintaan efektif. Besarnya investasi otonom tidak tergantung kepada besar kecilnya pendapatan nasional atau daerah. Investasi otonom berarti pembentukan modal yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Dengan kata lain, tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan

jumlah investasi yang di lakukan oleh perusahaan-perusahaan (Sukirno, 2006).

Investasi oleh masyarakat lebih banyak di lakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau motif bisnis, begitu juga dengan investasi asing atau penanaman modal luar negeri dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau motif bisnis di lain sisi kita mendapatkan dampak positifnya. Investasi yang ditanam di suatu negara atau daerah, di tentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

(a) Tingkat keuntungan yang diramalkan

Ramalan mengenai keuntungan masa depan akan memberikan gambaran kepada pengusaha mengenai jenis-jenis usaha yang prospektif dan dapat dilaksanakan di masa depan, dan besarnya investasi yang harus dilakukan untuk memenuhi tambahan barang-barang modal yang di perlukan.

(b) Tingkat Bunga

Tingkat bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberikan keuntungan kepada para pengusaha, dan para investor hanya akan menanamkan modalnya apabila tingkat pengembalian modal dari modal yang di tanam, berupa persentase keuntungan netto (belum dikurangi dengan tingkat bunga yang di bayar), modal yang di peroleh lebih besar dari tingkat bunga. Seorang investor mempunyai dua pilihan di dalam menggunakan modal yang dimilikinya yaitu: pertama, dengan meminjamkan atau membungakan uang tersebut (deposito); kedua, dengan menggunakannya untuk investasi. Dalam hal dimana pendapatan yang diperoleh adalah lebih dari tingkat bunga, maka pilihan terbaik adalah mendepositkan uang tersebut, dan akan menggunakannya untuk investasi apabila tingkat keuntungan yang di peroleh adalah lebih besar dari tingkat bunga yang akan dibayar.

- (c) Ramalan mengenai ekonomi di masa depan  
Dengan adanya ramalan tentang kondisi masa depan akan dapat menentukan tingkat investasi yang akan tercipta dalam perekonomian. Apabila ramalan di masa depan adalah baik maka investasi akan naik. Sebaliknya, apabila ramalan kondisi ekonomi di masa akan datang adalah buruk, maka tingkat investasi akan rendah.
- (d) Kemajuan teknologi  
Dengan adanya temuan-temuan teknologi (inovasi), maka akan semakin banyak kegiatan pembaharuan yang akan di lakukan oleh pengusaha, sehingga makin tinggi tingkat investasi yang dicapai.
- (e) Tingkat pendapatan nasional dan perubahannya  
Dengan bertambahnya pendapatan nasional maka tingkat pendapatan Masyarakat akan meningkat, daya beli masyarakat juga meningkat, total agregat demand yang pada akhirnya akan mendorong tumbuhnya investasi lain (*Induced Investment*).
- (f) Keuntungan yang di peroleh  
Semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka akan mendorong para pengusaha untuk menyediakan sebagian keuntungan yang diperoleh untuk investasi-investasi baru.
- (g) Situasi politik  
Kestabilan politik suatu negara akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi para investor terutama para investor asing, untuk menanamkan modalnya. Mengingat bahwa investasi memerlukan suatu jangka waktu yang relatif lama untuk memperoleh kembali modal yang di tanam dan memperoleh keuntungan. Sehingga stabilitas politik jangka panjang akan di harapkan oleh investor.
- (h) Pengeluaran yang di lakukan pemerintah.  
Pengeluaran-pengeluaran yang di lakukan oleh pemerintah dapat berupa pengeluaran pembangunan dan rutin baik itu dalam penyediaan sarana dan prasarana atau fasilitas publik dalam

menunjang kegiatan investasi dan juga perekonomian secara keseluruhan baik itu skala nasional maupun daerah. Sehingga menarik para investor dalam negeri maupun asing untuk berinvestasi di suatu negara ataupun daerah.

### Fungsi dan Peran Investasi Dalam Perekonomian

Investasi dalam berbagai bentuknya akan memberikan banyak pengaruh kepada perekonomian suatu negara ataupun dalam cakupan yang lebih kecil yakni daerah. Karena dengan terciptanya investasi akan membawa suatu negara pada kegiatan ekonomi tertentu.

Investasi yang akan berlanjut dengan suatu proses produksi akan menciptakan lapangan kerja, menciptakan barang-barang dan jasa untuk di pasarkan kepada konsumen, dan interaksi antara produsen, dalam hal ini investor, dan konsumen dalam menawarkan dan mengkonsumsi barang-barang atau jasa, dan pada gilirannya akan menciptakan kemajuan perekonomian dalam suatu negara. Adanya fluktuasi dalam investasi seperti yang terlihat dalam "*business cycle*" merupakan salah satu dampak dari adanya investasi di dalam suatu perekonomian.

Pengeluaran investasi merupakan topik utama dalam ekonomi makro karena dua alasan berikut:

1. Fluktuasi investasi sangatlah besar sesuai dengan perubahan GDP (*Gross Domestic Product*), misalnya karena adanya *business cycle*.
2. Pengeluaran investasi menentukan tingkat pertumbuhan stok kapital dalam perekonomian, dimana stok kapital ini sangat menentukan tingkat pertumbuhan suatu negara dalam jangka panjang (Nanga, 2005).

Investasi yang di tanamkan dalam perekonomian salah satunya ditentukan oleh adanya permintaan dari masyarakat, yaitu berupa konsumsi atas barang-barang konsumsi dan jasa yang di hasilkan oleh perusahaan sehingga merangsang tumbuhnya investasi-investasi baru. Karena seperti

kita ketahui bahwa pendapatan yang diperoleh masyarakat akan di gunakan untuk konsumsi dan mungkin sebagian lagi untuk di tabung. Sehingga apabila penggunaan pendapatan untuk konsumsi dilambangkan dengan C, dan penggunaan pendapatan yang di terima dilambangkan dengan Y, maka perumusan menjadi  $Y = C + S$ . Seandainya keseluruhan pendapatan masyarakat itu dikonsumsi keseluruhannya ( $MPC=1$ ), sehingga besarnya K menjadi tidak terhingga, maka besarnya pertambahan pendapatan nasional juga menjadi tidak terhingga. Khusus kondisi di negara berkembang, dimana income masyarakat relatif rendah, kendati pendapatan masyarakat yang di terima diasumsikan keseluruhannya, dampaknya terhadap pertambahan pendapatan nasional tidak akan terlalu besar.

Hal ini di sebabkan karena kemampuan dalam pembentukan modal juga relatif rendah yang di sebabkan oleh lemahnya kemampuan menabung dari masyarakatnya yang tentu saja akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi terciptanya lembaga-lembaga keuangan padahal faktor-faktor tersebut sangat di perlukan di dalam proses pembangunan guna memacu pertumbuhan ekonomi.

Pembentukan modal merupakan faktor yang paling penting dan strategis di dalam proses pembangunan ekonomi. Pembentukan modal bahkan disebut sebagai "kunci utama menuju pembangunan ekonomi". Proses ini berjalan melewati 3 (tiga) tingkatan:

- (a) Kenaikan tabungan nyata yang tergantung pada kemauan dan kemampuan untuk menabung.
- (b) Keberadaan lembaga kredit dan keuangan untuk mengalahkan dan menyalurkan tabungan agar dapat menjadi dana yang dapat di investasikan.
- (c) Penggunaan tabungan untuk tujuan investasi dalam barang-barang modal pada perusahaan.

Pembentukan modal juga berarti pembentukan keahlian kerap kali berkembang sebagai akibat pembentukan modal (Jhingan, 2004). Pembentukan keahlian jelas merupakan salah satu dampak dari adanya perkembangan investasi. Investasi yang terus berkembang akan menuntut perkembangan sumber-sumber daya termasuk keahlian tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pembentukan atau penciptaan modal akan menjadi sia-sia kalau tidak ada faktor-faktor lain yang menunjang pertumbuhan ekonomi oleh karena itu, kehadiran sekelompok atau segolongan orang yang benar-benar tertarik pada pembangunan ekonomi, mempunyai kemauan menabung dan bersedia bekerja dengan imbalan material, merupakan prasyarat bagi kemajuan suatu perekonomian (Jhingan, 2004).

Harold dan Domar memberikan peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai peran ganda yang dimiliki investasi, yaitu:

1. Menciptakan pendapatan.
2. Memperbesar kapasitas produksi perekonomian.

Kedua hal ini sebagai dampak dari adanya permintaan dan penawaran investasi. Karena itu selama investasi berlangsung, pendapatan nyata dan output akan senantiasa membesar. Namun demikian, untuk mempertahankan tingkat ekuilibrium pendapatan pada tingkat *full employment* dari tahun ke tahun, baik pendapatan nyata maupun output tersebut, keduanya harus meningkat dalam laju yang sama pada saat kapasitas modal meningkat. Karena kalau tidak, setiap perbedaan keduanya akan menimbulkan kelebihan kapasitas modal meningkat. Karena kalau tidak, setiap perbedaan keduanya akan menimbulkan kelebihan kapasitas atau ada kapasitas yang menganggur. Hal ini memaksa para investor membatasi pengeluaran investasinya sehingga pada akhirnya akan berpengaruh buruk pada perekonomian yaitu berupa menurunnya

pendapatan dan pekerjaan pada periode berikutnya. Jadi, apabila pekerjaan ingin dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang, maka investasi harus senantiasa diperbesar.

Dalam konteks yang lain, penciptaan investasi juga membawa pengaruh perkembangan suatu daerah. Dampak tersebut disebut dengan *spread effect*. Yaitu apabila suatu investasi yang di tanamkan di dalam suatu daerah membawa pengaruh positif bagi daerah lainnya. Seperti timbulnya industri-industri perlengkapan atau penunjang bagi industri utama di daerah pusat investasi.

## 2.4 PEMBANGUNAN WILAYAH

### KONSEP WILAYAH

Wilayah diartikan sebagai suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu dalam bagian-bagiannya tergantung secara internal. Wilayah dapat dibagi menjadi empat jenis (Budiharsono, 2001): (1) wilayah homogen; (2) wilayah nodal; (3) wilayah administratif; (4) wilayah perencanaan.

#### 1. Wilayah Homogen

Konsep wilayah homogen dipandang sebagai daerah-daerah geografik yang dikaitkan bersama-sama menjadi satu daerah tunggal, apabila daerah-daerah tersebut memiliki ciri-ciri yang seragam/relatif sama (Richardson, 1997). Ciri-ciri kehomogenan itu dapat bersifat ekonomi misalnya daerah dengan struktur produksi dan konsumsi yang serupa, bersifat geografi misalnya wilayah yang mempunyai topografi/iklim yang sama, bahkan dapat juga bersifat sosial/politik misalnya kepribadian suatu wilayah yang bersifat tradisional kepada partai. Dengan demikian, apabila terjadi suatu perubahan pada suatu wilayah akan berpengaruh pada wilayah lainnya.

Daerah Pantura Jawa Barat (Indramayu, Subang, dan Karawang) merupakan salah satu contoh wilayah homogen dari segi produksi padi. Hal ini berarti setiap perubahan yang terjadi di wilayah tersebut, seperti subsidi harga pupuk, perubahan harga padi dan sebagainya akan mempengaruhi seluruh bagian wilayah tersebut dengan proses yang sama.

## 2. Wilayah Nodal

Wilayah nodal merupakan satuan-satuan yang heterogen dan memiliki hubungan yang erat satu sama lain dengan distribusi penduduk manusia, sehingga terbentuk suatu kota-kota besar, kotamadya maupun desa-desa. Ciri umum pada daerah-daerah nodal adalah penduduk kota tidak tersebar secara merata diantara pusat-pusat yang sama besarnya, melainkan tersebar pula diantara pusat-pusat yang besarnya berbeda-beda dan secara keseluruhan membentuk suatu hirarki perkotaan (*urban hierarchy*), sehingga timbul ketergantungan antara pusat-pusat (inti) dan daerah belakangnya (*hinterland*). Hal ini menyebabkan terjadinya pertukaran barang dan jasa secara intern di dalam wilayah tersebut. Daerah belakang akan menjual barang-barang mentah dan jasa tenaga kerja kepada daerah inti, sedangkan daerah inti akan menjual ke daerah belakang dalam bentuk barang jadi.

Contoh daerah nodal adalah Provinsi DKI Jakarta dan BOTABEK (Bogor, Tangerang, Bekasi) yang mana DKI sebagai daerah inti dan BOTABEK sebagai daerah belakangnya (Budiharsono, 2001).

## 3. Wilayah Administratif

Wilayah administratif merupakan wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan/politik, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan dan RT/RW. Hal ini disebabkan dua faktor, yaitu: (1) dalam melaksanakan kebijaksanaan dan rencana pembangunan wilayah diperlukan tindakan dari berbagai badan

pemerintahan; dan (2) wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan suatu administrasi pemerintah lebih mudah dianalisis (Glasson, 1977).

#### 4. Wilayah Perencanaan

Wilayah perencanaan didefinisikan sebagai wilayah yang memperlihatkan kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Wilayah perencanaan harus memiliki ciri-ciri: (1) cukup besar untuk mengambil suatu keputusan-keputusan investasi yang berskala ekonomi; (2) mampu mengubah industrinya sendiri dengan tenaga kerja yang ada; (3) memiliki struktur ekonomi yang homogen; (4) mempunyai sekurang-kurangnya satu titik pertumbuhan; (5) menggunakan suatu cara pendekatan perencanaan pembangunan; (6) masyarakat dalam wilayah mempunyai kesadaran bersama terhadap persoalan-persoalannya.

Penggunaan konsep wilayah (*region*) tersebut ditentukan oleh sifat dari analisa ekonomi regional yang dilakukan. Pada analisa yang lebih bersifat makro, *homogeneous region*, *planning region*, *administrative region* lebih banyak digunakan. Sedangkan untuk analisa yang bersifat mikro, *nodal region* akan lebih banyak digunakan. Namun demikian, pembagian penggunaan konsep *region* yang demikian tidaklah bersifat mutlak, karena dalam hal tertentu pengelompokan wilayah tersebut dapat dilakukan secara bersamaan atau merupakan gabungan (Sjafrizal, 2008).

Empat klasifikasi wilayah pembangunan menurut J. Friedman dan Alonso yaitu, (Adisasmita, 2005): (1) *metropolitan regions*, (2) *development axes*, (3) *frontier regions*, dan (4) *depressed regions*. *Metropolitan regions* atau wilayah-wilayah metropolitan seringkali disebut pula sebagai wilayah-wilayah inti (*core regions*) atau kutub-kutub pertumbuhan (*growth poles*). Pusat-pusat pengembangan ini merupakan kota-kota besar dengan segala kegiatan dan fasilitas industri, perdagangan, transportasi dan komunikasi, keuangan, perbankan, serta administrasi pemerintahan, yang

keseluruhannya mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan wilayah disekitarnya (*hinterland*) dan kota-kota kecil lainnya (*small centres*).

*Development axes* atau poros pembangunan yaitu meliputi wilayah-wilayah yang terletak pada jaringan transportasi yang menghubungkan dua wilayah metropolitan atau lebih. Dapat dikatakan bahwa prospek pembangunan wilayah-wilayah tersebut kurang lebih akan proposional dengan tingkat dan luas pembangunan wilayah-wilayah yang dihubungkan yaitu poros pembangunan. *Frontier regions* atau wilayah-wilayah perbatasan. Dengan adanya kemajuan teknologi baru, tekanan penduduk, demikian juga tujuan-tujuan nasional baru seringkali mendorong pembangunan diarahkan menuju ke wilayah-wilayah yang belum diolah atau wilayah-wilayah yang terletak di wilayah perbatasan. *Depressed Region* atau wilayah-wilayah yang mengalami kemandegan atau penurunan dalam pembangunan karena tidak memiliki potensi sumber daya pembangunan yang dapat diandalkan, misalnya wilayah yang tandus dan gersang.

Menurut Okun dan Richardson, tingkat kemakmuran dinyatakan dengan pendapatan per kapita dan kemampuan berkembang dikaitkan dengan laju pertumbuhan pembangunan. Selanjutnya berdasarkan kriteria tersebut, pembagian wilayah dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. *Low per capita income and stagnant regions* (LS) atau wilayah-wilayah yang mempunyai pendapatan per kapita rendah dan kurang berkembang.
2. *High per capita income and stagnant regions* (HS) atau wilayah-wilayah yang mempunyai pendapatan per kapita tinggi tetapi kurang berkembang.
3. *Low per capita income and growing regions* (LG) atau wilayah-wilayah yang mempunyai pendapatan per kapita rendah tetapi berkembang.

4. *High per capita income and growing regions* (HG) atau wilayah-wilayah yang mempunyai pendapatan per kapita tinggi dan berkembang.

### STRATEGI PEMBANGUNAN WILAYAH

Pengembangan wilayah seharusnya diutamakan pada pengembangan potensi sumber daya alam dan potensi lokal di wilayah tersebut dimana mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan dalam mencapai tujuan pembangunan. Strategi pembangunan wilayah adalah strategi keterkaitan yaitu terjadi pada suatu wilayah yang dari sisi supply atau dari sisi demand relatif lebih tinggi tetapi terbatas akan sumberdaya. Keterbatasan atau kelebihan dari suatu wilayah seharusnya dapat dipertemukan sehingga perekonomian wilayah secara keseluruhan dapat meningkat. Strategi berbasis keterkaitan antar wilayah pada awalnya dapat diwujudkan dengan pengembangan keterkaitan fisik antar wilayah dengan membangun berbagai infrastruktur fisik seperti jaringan transportasi jalan, pelabuhan, jaringan komunikasi dan lainnya yang dapat menciptakan keterkaitan sinergis antar wilayah (Rustiadi *et al.*, 2007). Menurut Lorenzo (2002) kebijakan pembangunan pemerintah yang mendorong wilayah miskin dalam rangka menyetarakan standar hidup dengan wilayah maju maka pemerintah dapat menggunakan tiga instrumen utama diantaranya desentralisasi keuangan, perbaikan sistem perdagangan dan penyediaan infrastruktur yang tepat. Akan tetapi keterkaitan fisik saja tidak cukup, harus disertai dengan pengembangan keterkaitan yang lebih luas yakni disertai dengan kebijakan-kebijakan menciptakan struktur intensif yang mendorong keterkaitan yang sinergis antar wilayah. Pengembangan keterkaitan yang tidak tepat sasaran dapat mendorong backwash yang lebih masif, sehingga pada akhirnya justru meningkatkan kesenjangan dan ketidakberimbangan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu keterkaitan antarwilayah yang diharapkan adalah bentuk-bentuk

keterkaitan yang saling memperkuat bukan memperlemah.

Paradigma baru pembangunan diarahkan kepada terjadinya pemerataan (*equity*), pertumbuhan (*eficiency*), dan keberlanjutan (*sustainability*) dalam pembangunan ekonomi. Fokus pembangunan lebih diorientasikan pada pembangunan spasial pada tingkat wilayah dan lokal dengan mengutamakan sektor pertanian sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas masyarakat lokal. Dari segi konsep ekonomi, efisiensi Pareto dalam alokasi sumberdaya dapat dilakukan dengan memadukan kebijakan pemerintah pada suatu batas tertentu seperti target pemerataan melalui transfer, perpajakan dan subsidi sedangkan proses selanjutnya diserahkan pada mekanisme pasar (*market friendly*). Untuk mendukung terjadinya proses tersebut, diperlukan penegasan hak-hak masyarakat daerah dan lokal (*local property right*) yang semula terpusat akan digeser menjadi penegasan *property right* yang terdesentralisasi. Pertumbuhan kota-kota daratan juga dapat bergeser ke wilayah lain seperti wilayah pesisir (perdesaan) dengan diberikan fasilitas infrastruktur kota di wilayah desa pesisir untuk kegiatan wisata dan kegiatan produksi serta perdagangan lain sehingga akumulasi modal dapat memberikan dampak multiplier kepada masyarakat lokal (Rustiadi, 2011).

#### KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH

Kebijakan pembangunan regional pada dasarnya merupakan intervensi pemerintah, baik secara nasional maupun regional untuk mendorong proses pembangunan daerah secara keseluruhan. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan suatu kondisi pembangunan atau masyarakat yang diinginkan, baik pada saat sekarang maupun untuk periode tertentu dimasa mendatang. Sasaran akhir dari kebijakan pembangunan tersebut adalah untuk dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat (Sjafrizal, 2008).

Sama halnya dengan tingkat nasional, kebijakan pembangunan daerah juga diperlukan pada tingkat regional. Kebijakan pada tingkat regional diperlukan karena kondisi, permasalahan, dan potensi pembangunan yang dimiliki oleh suatu wilayah umumnya berbeda satu sama lainnya sehingga kebijakan yang diperlukan juga tidak sama. Disamping itu, antara suatu daerah dengan daerah lainnya akan mempengaruhi pula kondisi dan pembangunan pada daerah terkait. Karena itu, kebijakan pada tingkat nasional yang diberlakukan secara umum pada seluruh wilayah tidak akan sesuai untuk memecahkan masalah pembangunan pada masing-masing daerah. Untuk dapat memaksimalkan proses pembangunan daerah, maka kebijakan pembangunan regional perlu diterapkan untuk masing-masing daerah.

Sasaran pembangunan menurut [Todaro \(2006\)](#) yaitu:

1. Meningkatkan persediaan dan perluasan pembagian/pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti perumahan, kesehatan, dan lingkungan.
2. Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi, yang semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi untuk meningkatkan kesadaran harga diri baik individu maupun nasional.
3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua pilihan individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan negara lain, tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan.

Pada kenyataannya, tidak semua wilayah dapat mewujudkan hal tersebut sehingga pembangunan akhirnya tidak merata di seluruh wilayah.

Perbedaan pembangunan antarwilayah dapat dijelaskan oleh sejumlah teori, yakni teori basis ekonomi, teori lokasi, dan teori daya tarik industri (Tambunan, 2003).

1. Teori Ekonomi Basis

Teori ini menjelaskan bahwa faktor utama penentu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh hubungan langsung permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Proses produksi sektor industri di suatu wilayah yang menggunakan sumber daya produksi lokal (tenaga kerja, bahan baku, dan produk unggulan yang diekspor) akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita dan penciptaan lapangan kerja di wilayah tersebut.

2. Teori Lokasi

Teori ini digunakan untuk menentukan pengembangan kawasan industri di suatu wilayah. Lokasi usaha ditempatkan pada suatu tempat yang mendekati bahan baku atau pasar. Hal ini ditentukan berdasarkan tujuan perusahaan dalam rangka memaksimalkan keuntungan dengan biaya serendah mungkin.

3. Teori Daya Tarik Industri

Teori ini dilatarbelakangi oleh adanya pembangunan industri di suatu wilayah, sehingga faktor-faktor daya tarik usaha antara lain produktivitas, industri-industri yang saling berkaitan, daya saing masa depan, spesialisasi industri, potensi ekspor, dan prospek permintaan domestik.

Dengan demikian, konsep pembangunan wilayah secara mendasar mengandung prinsip pelaksanaan kebijakan desentralisasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai sasaran nasional yang bertumpu pada trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas. Dalam hal ini pembangunan wilayah merupakan upaya pemerataan pembangunan dalam pengembangan wilayah-wilayah tertentu melalui berbagai kegiatan sektoral secara terpadu,

sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah itu secara efektif dan efisien serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Tambunan, 2003).

### KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH

Dalam konteks Indonesia, adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah telah menyebabkan tidak tercapainya salah satu trilogi pembangunan nasional, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya diantara berbagai daerah. Karena itu, kesadaran akan perlunya perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional hingga terus berkembang (Ambardi dan Prihawantoro, 2002). Beberapa faktor penyebab ketimpangan pembangunan antarwilayah, yaitu (Sjafrizal, 2008):

1. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam

Sebagaimana diketahui bahwa perbedaan sumber daya alam di Indonesia ternyata cukup besar. Ada daerah yang mempunyai minyak dan gas alam, tetapi daerah lain tidak mempunyainya. Ada beberapa daerah yang mempunyai deposit batubara yang cukup besar, tapi daerah lain tidak ada. Demikian juga halnya dengan tingkat kesuburan lahan yang juga sangat bervariasi sehingga mempengaruhi upaya untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing-masing daerah.

2. Perbedaan Kondisi Demografis

Kondisi demografi yang dimaksud disini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan.

### 3. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antardaerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah karena bila mobilitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan.

### 4. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar.

### 5. Alokasi Dana Pembangunan Antar Daerah

Investasi merupakan salah satu yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu, daerah yang dapat alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat.

Kebijakan untuk menanggulangi ketimpangan pembangunan wilayah dapat dilakukan dengan cara (Sjafrizal, 2008):

#### 1. Penyebaran Pembangunan Prasarana Perhubungan

Prasarana perhubungan yang dimaksud adalah fasilitas jalan, terminal, dan pelabuhan laut guna mendorong proses perdagangan antardaerah.

#### 2. Mendorong Transmigrasi dan Migrasi Spontan

Melalui proses transmigrasi dan migrasi spontan ini, kekurangan tenaga kerja yang dialami oleh daerah terbelakang akan dapat pula diatasi sehingga proses pembangunan daerah bersangkutan dapat pula digerakkan.

### 3. Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Kebijakan ini diperkirakan akan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah karena pusat pertumbuhan tersebut menganut konsep *konsentrasi* dan *desentralisasi* secara sekaligus.

### 4. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Adanya pelaksanaan otonomi daerah, maka aktivitas pembangunan daerah, termasuk daerah terbelakang akan dapat lebih digerakkan karena ada wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat.